

Mata Kuliah Regionalisme
Perkembangan Regionalisme Asia Tenggara dan Kaitannya dengan Kerja Sama
Tiongkok
Stefanus Ari Wicaksono
1444010009

Abstrak

Regionalisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara pada penghujung dekade 1960an merupakan fenomena sekaligus proses yang menarik. Negara-negara yang umumnya baru saja merdeka sudah mantap mendirikan sebuah institusi regional yang jauh dari tangan negara-negara luar dan mengarahkannya untuk membendung perang dingin di kawasan tersebut, namanya adalah ASEAN. Institusi regional ini menunjukkan ketangkasan maupun kemajuannya sangat luar biasa, salah satu buktinya ialah negara sebesar Tiongkok mau menjadi mitra kerja samanya di dekade 1990-an atau kurang lebih tiga puluh tahun umur ASEAN itu sendiri. Di samping itu ASEAN dapat mengimplementasikan prinsip dan normanya sangat baik bahkan menjadi institusi regional yang banyak disanjung dunia internasional karena dapat membendung semua permasalahan yang ada dalam setiap tumbuh kembangnya. Melalui jurnal ilmiah ini, penulis ingin menyuguhkan suatu pemahaman terkait perkembangan regionalisme Asia Tenggara hingga menjadi bentuk institusi yang bisa dibilang mapan beserta hubungan kerja samanya dengan negara raksasa terdekatnya yakni Tiongkok. Kerangka pemikiran dari tulisan ini adalah pemahaman dari regionalisme, lalu selang pandang mengenai ASEAN dari awal terbentuknya hingga dinamika hidupnya, lalu maju ke proses kerja sama dengan Tiongkok dan di akhiri dengan keadaan saat ini di antara keduanya. Penulis menggunakan beberapa teori yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan seperti regionalisme beserta pendukungnya yakni neo-fungsionalisme, neo-liberalisme institusional, konstruktivisme dan liberalisme milik Ekonomi Politik Internasional. Pembahasan ini memang klasik dan dirasa mampu mengantarkan ke arah yang lebih kompleks yaitu saat ini di mana hubungan keduanya diproyeksi menjadi lebih dekat daripada sebelumnya.

Pendahuluan

Sebelum masuk ke dalam pembahasan inti mengenai dinamika kemitraan ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok, penulis akan menyuguhkan beberapa pengantar yang setidaknya dapat membawa pemahaman atau memperkuat pondasi pembahasan. ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional yang berlingkup (skala) kawasan Asia Tenggara. Ibarat ingin mengupas buah atau daging dibutuhkan pisau khusus dan tidak boleh sembarangan agar mendapatkan hasil yang optimal, begitu pula untuk memahami lebih dalam mengenai ASEAN pendekatan yang paling baik untuk

digunakan adalah Regionalisme beserta teori-teori pendukungnya seperti neo-fungsionalisme dan sebagainya.

Regionalisme atau biasa awam ketahui adalah suatu pandangan terkait adanya hubungan antar negara dalam suatu kawasan, karena umumnya pelajaran terkait hubungan internasional bagi awam memang hanya sebatas bilateral, multilateral beserta kawasan. Akan tetapi mendapatkan penegasan oleh Mansbaach dalam buku *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional* karya Nuraeini, Deasy dan Arfin yakni, *region* atau kawasan adalah pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional (Mansbaach dalam Nuraeini, Deasy & Arfin, 2010). Di samping itu Coulumbis dan Richard dalam buku yang sama mengatakan bila ada empat cara yang bisa digunakan untuk mendefinisikan *region* tersebut, keempat cara tersebut ialah, kriteria geografis (pengelompokan negara berdasarkan lokasinya), kedua adalah kriteria politik atau militer (mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada keikutsertaannya dalam berbagai aliansi), lalu yang ketiga yaitu kriteria ekonomi (mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi), dan terakhir atau yang keempat adalah kriteria transnasional (mengelompokkan negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang, dan jasa) (Coulumbis & Richard dalam Nuraeini, Deasy & Arfin, 2010).

Jika penulis boleh tambahkan menurut beberapa pernyataan di atas, sebenarnya regionalisme ini adalah bentuk pandangan yang mengatakan adanya suatu pengelompokan negara-negara yang umumnya memiliki beberapa persamaan atau rumpun dalam berbagai aspek seperti sejarah, politik, budaya, geografis hingga meluas ke perdagangan atau sering disebut dengan kawasan kepentingan. Pengelompokan ini nantinya bisa mengarah ke hubungan yang lebih serius lagi hingga membentuk sebuah organisasi internasional berskala kawasan lengkap dengan berbagai struktur dan kaidah di dalamnya. Regionalisme ini bila dilihat dari pernyataan-pernyataan di atas sarat akan kerja sama dan ketergantungan akan tetapi untuk penjelasan terkait ini akan penulis sisipkan di bagian teori-teori pendukung regionalisme di paragraf-paragraf berikutnya.

Menurut Suyatno Ladiqi Ph.D dalam mengampu mata kuliah Regionalisme bahwasannya terdapat perbedaan baik arti maupun esensi dari *region*, regionalisme dan regionalisasi. Regionalisme (Ladiqi, 2016), *top down governmental project, the conscious, deliberate and purposive attempts made by national states to create global mechanisms for dealing with common transnational issues*. Sedangkan regionalisasi (Ladiqi, 2016)

ialah, *the creation of transnational economic spaces creating a de facto region that does not need a formal regional organization to flourish, trade, financial flows, technology transfers and population movements are no doubt important indicators of regionalization, yet there is more to the phenomenon than volume of these flows*. Menurut pendapat penulis dari apa yang telah dikemukakan di atas bahwa regionalisme itu perlu adanya membuat sebuah organisasi terstruktur dan umumnya melibatkan para pemerintah akan tetapi sedikit berbeda dengan regionalisasi yang ada hanya lalu lintas kerja sama tanpa terikat organisasi melainkan sekedar MoU dan itu pun bebas dilakukan oleh non-pemerintah contohnya adalah Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan dan Republik Rakyat Tiongkok.

Region (Ladiqi, 2016) tidak hanya seputar geografi saja melainkan banyak faktor lain seperti kawasan agama contohnya adalah mayoritas negara penghuni Uni Eropa adalah Kristen sedangkan Turki yang juga mencakup Eropa tapi mayoritas penduduknya muslim masih dalam pertimbangan yang lama untuk bergabung. Dan penulis juga ingin memberikan sebuah contoh ringan yakni kawasan ekonomi seperti yang dimiliki oleh ASEAN, Timor Leste memiliki masalah dalam pembangunan ekonomi tapi berada di dalam kawasan geografis Asia Tenggara tapi masih juga dalam pertimbangan untuk bergabung. Berdasarkan pernyataan milik para ahli di atas penulis ingin menekankan jika *region* tidak hanya berupa kawasan geografis melainkan kawasan kepentingan, jika ingin dilihat atau dipandang dalam ruang lingkup yang luas.

Proses Terbentuknya Regionalisme

Setelah membahas terkait definisi regionalisme beserta batasan-batasan antara *region* dan regionalisasi, penulis akan menambahkan proses terbentuknya regionalisme. Andrew Hurrell dalam buku *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional* karya Nuracini, Deasy dan Arfin membagi lima tahap proses terbentuknya sebuah regionalisme yaitu,

- a. Regionalisasi sudah penulis jabarkan definisinya di atas namun untuk menekankan istilah ini dalam proses terbentuknya regionalisme maka penulis akan menyertakan definisi yang sesuai menurut Hurrell, bersifat alami dengan sendirinya negara yang bertetangga secara geografis akan melakukan kerja sama guna memenuhi berbagai kebutuhan.
- b. Kesadaran dan identitas regional (*regional awareness and identity*), persepsi bersama tentang rasa memiliki pada suatu komunitas tertentu dengan faktor internal sebagai pengikat-sering didefinisikan dalam kerangka kesamaan budaya, sejarah atau tradisi agama.
- c. Kerja sama regional antarnegara, menunjukkan interdependensi termasuk negosiasi-negosiasi bilateral sampai pembentukan rezim yang dikembangkan untuk memelihara kesejahteraan,

meningkatkan nilai-nilai bersama, serta memecahkan masalah terutama yang timbul dari meningkatnya tingkat interdependensi regional.

- d. Integrasi regional yang didukung negara, salah satu subkategori penting dalam kerja sama regional adalah integrasi ekonomi regional. Integrasi yang melibatkan pembuatan kebijakan khusus oleh pemerintah yang disusun untuk mengurangi hingga menghilangkan hambatan-hambatan dalam pertukaran jasa dan orang-orang.
- e. Dan yang terakhir adalah proses kohesi regional, merujuk pada kemungkinan kombinasi dari keempat proses yang terdahulu mengarah pada terbentuknya unit regional yang kohesif dan terkonsolidasi (Hurrell dalam Nuracini, Deasy & Arfin, 2010)

Teori-teori Pendukung Regionalisme

Di dalam pandangan regionalisme ini sendiri terdapat beberapa teori pendukung yang sekiranya dapat membantu pembahasan ini. Penulis akan menggunakan pendekatan melalui teori neo-fungsionalisme, neo-liberalisme institusionalisme dan konstruktivisme. Umumnya teori-teori yang di gunakan oleh penulis adalah buah atau anak dari liberalisme, mengapa demikian ? Karena berbeda dengan rivalnya, liberalisme sendiri lebih mengutamakan kerja sama dan sederhananya adalah berbuat baik dengan tetangga maupun sekitarnya walaupun kepentingan itu ada tapi itu demi kebutuhan bersama yang sifatnya menguntungkan segala aspek.

Neo-fungsionalisme sendiri adalah pengembangan dari pendahulunya yakni fungsionalisme, dan memandang regionalisme dari integrasi akan menghasilkan *self-sustaining* dan memiliki sifat *spill over* (Nuracini, Deasy & Arfin, 2010). *Spill over* sendiri memiliki dua jenis yakni *spill over fungsional* yang secara mudahnya adalah integrasi parsial dan meningkatnya kompleksitas interdependensi berarti yang mana kerja sama di satu wilayah akan menekan pemerintah untuk memperluas kerja sama di bagian lain yang lebih luas (Nuracini, Deasy & Arfin, 2010). Kemudian *spill over politis* yang akan mengarah ke loyalitas, di mana aktor-aktor akan membagi loyalitasnya dan kegiatan-kegiatan politisnya pada suatu pusat baru yakni regionalisme itu sendiri (Nuracini, Deasy & Arfin, 2010).

Teori selanjutnya adalah neo-liberalisme insitusional, yang mana merupakan pembaharuan dari liberalisme klasik ditambah varian institusional. Secara gambaran memberikan pandangan yakni semakin tinggi interdependensi, semakin tinggi pula tuntutan untuk melakukan kerja sama. Begitupula varian institusionalnya sendiri memberikan kontribusi pandangan sebagai berikut, institusi-institusi diyakini mampu memberikan solusi terhadap berbagai jenis permasalahan secara kolektif (Nuracini, Deasy & Arfin, 2010). Melihat pandangan tersebut penulis mengutip dan

menyimpulkan sebuah pernyataan dari Robert Keohane, jika rezim-rezim internasional itu sendiri berupa mitos jika dianggap melampaui kedaulatan negara. Justru, negara-negara sendiri yang sengaja menetapkan maupun mencetuskan rezim-rezim tersebut untuk mencapai tujuan-tujuannya (Keohane dalam Nuraeni, Deasy & Arfin, 2010).

Walaupun pembaharuan dari liberalisme, teori ini termasuk *state-sentris* bahwasannya dalam institusi internasional negara-negara di arahkan untuk berkerja sama terkait dengan kalkulasi untung rugi. Maksud dan tujuannya ialah untuk menganalisis dan memisahkan kumpulan-kumpulan tertentu dari kekuasaan, kepentingan dan pilihan-pilihan yang mungkin untuk menjelaskan sumber-sumber dan batasan-batasan dari tingkah laku kooperatif (Nuraeni, Deasy & Arfin, 2010). Teori ini akan memandang regionalisme sebagai eksternalitas kebijakan internasional yang membutuhkan manajemen kolektif (Nuraeni, Deasy & Arfin, 2010). Maksudnya adalah negara-negara akan menghasilkan suatu kebijakan eksternal internasionalnya dari satu negara ke negara lain dan untuk menghindari suatu *chaos* dibutuhkan suatu manajemen kolektif untuk bisa mengaturnya. Dan juga insentif bagi pengurangan biaya transaksi dan memfasilitasi berbagai hubungan intra-regional di samping itu regionalisme diharapkan akan mampu membentuk *interstate co-operative institutions* (Nuraeni, Deasy & Arfin, 2010).

Dan yang terakhir adalah teori konstruktivisme, memiliki pandangan tentang ide, kepercayaan, peran dan tradisi akan membentuk perilaku dan berbagai hasil karya yang dibuat oleh para aktor atau menghasilkan pola pikir, Wendt sendiri mengaitkan hasil dari teori ini melalui kegiatan yang disituasikan (Wendt dalam Nuraeni, Deasy & Arfin, 2010). Hubungan dari teori ini dengan regionalisme sendiri yaitu, fokus pada kesadaran dan identitas regional dalam membagi rasa kepemilikan kepada suatu komunitas regional tertentu, dan fokus pada yang telah disebut sebagai regionalisme kognitif (Nuraeni, Deasy & Arfin, 2010).

Sejarah Pembentukan ASEAN (*Association of South East Asian Nations*)

Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan geografis yang dapat dikatakan sebagai peninsulanya benua Asia yang menghadap ke Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kawasan ini sering menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pedagang baik dari Eropa, Timur Tengah hingga benua lain, sekaligus tempat penyebaran ideologi, budaya dan agama dari seluruh penjuru dunia. Maka dari itu tidak heran jika dari abad pertengahan hingga abad 20, Asia Tenggara menjadi pangsa empuk negara-negara luar yang memiliki daya imperial yang tinggi seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, Jepang, Amerika Serikat dan sebagainya.

Oleh sebab itu pada saat negara-negara di Asia Tenggara ini lepas atau merdeka dari cengkraman negara-negara imperial langsung mengambil posisi untuk menjaga keamanan negaranya masing-masing dari kedua blok adidaya dunia pada perang dingin sekitar 1945-1965 an. Banyak sekali organisasi-organisasi *ad hoc* dari negara-negara besar tumbuh subur di kawasan ini seperti *Southeast Asia Treaty Organizations* (SEATO) yang lebih bergerak dalam bidang keamanan kolektif dan umumnya diprakarsai oleh negara-negara luar Asia Tenggara khususnya dari blok Barat untuk membendung upaya berkembangnya ideologi komunis di kawasan tersebut (Cipto, 2006). Berlanjut ke *Association of Southeast Asia* (ASA) pada tahun 1961, yang mana anggotanya terdiri dari Malaysia, Philipina dan Thailand dan bebas dari prakarsa negara di luar Asia Tenggara kendati begitu tetap saja bubar akibat konfrontasi antara Philipina dan Malaysia terkait status daerah Sabah. Dari konfrontasi tersebut, Indonesia memiliki inisiatif untuk mendirikan organisasi serupa antara tiga negara untuk membendung konfrontasi itu yakni Maphilindo tapi tetap disayangkan jika itu kandas di tengah jalan akibat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia (Cipto, 2006).

Sekedar *intermezzo*, Asia Tenggara yang sudah penulis kemukakan adalah kawasan yang sangat amat strategis. Akan tetapi paska kemerdekaannya sebagai negara baru yang cukup labil di tengah kondisi politik global yang cenderung mengarah ke blok Barat dan Timur, maka dari itu salah satu blok yakni Barat memiliki inisiatif untuk bisa membendung Asia Tenggara dari blok Timur beserta ideologinya yakni Komunisme. Ini terbukti dari organisasi keamanan yang sudah penulis jabarkan secara singkat di paragraf sebelumnya, di samping itu Dr Bambang Cipto juga menunjukkan adanya hubungan kedekatan dan keamanan antara Thailand, Philipina dengan Amerika Serikat dan Singapura, Malaysia dengan Inggris (Cipto, 2006). Bila ditilik lebih dalam negara-negara Asia Tenggara tersebut memiliki sejarah panjang dengan Amerika Serikat dan Inggris jauh sebelum merdeka.

Keempat negara Asia Tenggara bakal pendiri ASEAN mengalami ketakutan karena Indonesia yang besar dan tangguh memiliki hubungan dekat dengan blok Timur, karena politik yang dijalankan oleh Soekarno juga mengarah ke kiri-kiri an dan juga lebih dikenal dengan politik konfrontasi. Suyatno Ladiqi Ph.D dalam mata kuliah Regionalisme juga pernah menyebutkan bila ini menjadi kekawatiran negara-negara blok Barat, akan tetapi menjadi kelegaan saat Socharto menjadi presiden karena menghentikan politik konfrontasi Soekarno walaupun terjadi penumpasan Partai Komunis Indonesia secara tidak sadar itu menurunkan moral ideologi komunis dan mengurangi potensi Perang Satelit (*proxy war*) di Asia Tenggara (Ladiqi, 2016).

Sesaat Indonesia dipimpin oleh Soeharto, potensi integrasi kawasan Asia Tenggara terlihat dan hubungan baik negara-negara cikal bakal pendiri pun terasa. Buktinya adalah berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1966. Setelah itu menurut Dr Bambang Cipto (Cipto, 2006) ketidakpastian masa depan perang Vietnam juga menjadi dorongan lain bagi negara-negara non-komunis untuk membentuk integrasi regional. Stimulus-stimulus ini lah yang menjadi wujud dari pembentukan ASEAN pada 8 Agustus 1967.

Dinamika Internal & Eksternal ASEAN

Singkatnya dinamika internal & eksternal ini akan dimulai dengan pembahasan prinsip dan norma ASEAN yang secara langsung akan mengarah ke judul sub-tema di atas. Negara-negara ASEAN menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama (*Treaty of Amity and Cooperation*) yang di latarbelakangi oleh kekawatiran akan pecahnya dalam tubuh ASEAN (intenal) maupun pengaruh-pengaruh dari negara-negara luar secara langsung (eksternal) yang juga berdampak pada hal serupa. Prinsip ini menghasilkan empat poin, seperti saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah. Kedua setiap negara berhak memelihara keberadaannya dari campur tangan, subversi, kekerasan dan kekuatan luar. Ketiga tidak mencampuri urusan dalam negara lain. Keempat menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian dengan jalan damai. Dan yang kelima yakni menolak ancaman penggunaan ancaman kekerasan (Cipto, 2006).

Dipertegas lagi oleh Amitav Acharya dalam Cipto, terdapat empat normadasar yang tumbuh dalam ASEAN antara lain, pertama menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai. Kedua otonomi regional, lalu yang ketiga ialah prinsip tidak mencampuri urusan negara lain. Dan yang keempat atau terakhir adalah menolak pembentukan aliansi militer dan mengedepankan kerja sama pertahanan bilateral. Norma-norma ini lah yang menjadi pedoman agar ASEAN tetap utuh walaupun ibarat pisau bermata dua ini bisa menjadi buah simalakama atau konsekuensi buruk seperti yang terjadi di Uni Eropa mengutip yang dijelaskan oleh Suyatno Ladiqi Ph.D, bahwasannya Uni Eropa sebagai wilayah yang cinta damai tapi menjadi bingung atau dilematis saat migran dari Timur Tengah datang ke wilayahnya secara beramai-ramai (Ladiqi, 2016).

Beberapa studi kasus dari penerapan prinsip dan norma ini adalah, kasus Sabah antara Malaysia dengan Philipina. Kasus ini di provokasi oleh Philipina singkat kata Malaysia tersinggung dan ingin mengeluarkan diri dari ASEAN bahkan hubungan diplomatik dari kedua negara ini sempat berhenti dalam waktu sementara. Himbauan yang dikeluarkan oleh ASEAN adalah upaya penyelesaian dengan cara damai sesuai prinsip dan norma ASEAN, lalu harapan perdamaian terwujud pada tahun

1969. Kedua negara lebih menghargai keutuhan ASEAN jauh lebih penting dari kepentingan masing-masing (Cipto, 2006). Bila penulis lihat, teori neo-fungsionalisme benar-benar nyata di kasus ini di mana kedua negara lebih mementingkan atau loyal terhadap pusat baru yakni ASEAN yang pada waktu itu baru dibentuk dua tahun sebelumnya dibandingkan dengan kepentingan negara sendiri.

Studi kasus yang kedua adalah kasus invasi Vietnam ke Kamboja tahun 1979, di mana sebagai terdapat prinsip dan norma yang mengarah ke *non-interference*. Jadi, ASEAN hanya dapat melakukan himbauan maupun memberi penegasan agar negara-negara di Asia Tenggara lebih menghargai dan menjaga kemerdekaan, kedaulatan dan sistem politik negara lain dan menahan diri agar tidak melakukan tindakan subversif baik langsung maupun tidak langsung (Cipto, 2006). Meskipun yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat yakni terkait pengungsi konflik Rohingya, di mana ASEAN sebagai organisasi regional tidak dapat berbuat banyak karena ini merupakan masalah internal negara Myanmar. Menurut sebuah pernyataan dari seorang ahli yakni Prof Enny Soeprapto melalui berita *Netral News*, ASEAN sendiri memiliki etika emas untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri antar anggota (Netralnews, 2016). Dengan begitu hampir sama kasusnya dengan Uni Eropa bisa menjadi buah simalakama atau dilematis, di saat ada korban genosida yang terkatung-katung di laut karena negaranya tidak mau menerima tetapi negara-negara sekitarnya hanya dapat melihat dan menghibau saja. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akhir-akhir ini mengunjungi Myanmar untuk melakukan dialog dengan Aung San Suu Kyi yang seorang Menteri Luar Negeri merangkap Konselor Negara Myanmar (BBC Indonesia, 2016).

Untuk dinamika eksternal, penulis menyuguhkan studi kasus yang menggambarkan balada Malaysia pada tahun 1969 yang mana terjadi kerusuhan berdarah. Menurut Dr Bambang Cipto, konflik rasial ini dikhawatirkan berpotensi mengundang perhatian Tiongkok karena banyaknya warga Malaysia keturunan Tiongkok (Cipto, 2006). Maka dari itu Malaysia dengan kekeh memberikan suatu gagasan netralisasi kawasan Asia Tenggara dalam bentuk *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN). Sementara itu Indonesia menginterpretasikan netralitas sebagai netralitas ASEAN dari kerja sama militer dengan negara-negara Barat (Cipto, 2006)

Perkembangan Republik Rakyat Tiongkok terhadap Pembentukan ASEAN

Setelah membahas mengenai ASEAN baik dari awal pembentukannya hingga prinsip dan norma beserta sedikit dinamika internal eksternalnya. Penulis akan memberikan selang pandang mengenai

pandangan politik Republik Rakyat Tiongkok. Mengapa penulis menyertakan pembahasan ini ? Karena jawabannya pandangan politik maupun perkembangan politik internal Tiongkok itu benar-benar menjadi stimulus atau *trigger* atau bisa dikatakan penentu kemitraan khususnya yang terkait dengan ASEAN, jadi jika tidak menyertakan itu akan sangat susah untuk masuk ke dalam pembahasan terkait kemitraan.

Tiongkok sendiri pada waktu perang dingin sangat dekat hubungannya dengan Uni Soviet, dan juga banyak berpengaruh di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia (pada waktu kepemimpinan Soekarno). Namun, tidak dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia (negara pendiri ASEAN) yang masing-masing memiliki pelindung keamanan dari blok Barat. Setelah ASEAN berdiri, justru Tiongkok merasa bahwa ini adalah ancamannya karena ASEAN dicurigai dibentuk dari negara-negara blok Barat dan menganggap ASEAN adalah anti komunis. Hal ini dipertegas oleh Dr Bambang Cipto (Cipto, 2006) melalui buku yang sama seperti sebelumnya, bahwa Tiongkok menganggap demikian karena sebagian anggota ASEAN memiliki hubungan keanggotaan dengan organisasi keamanan regional yang dibentuk dan dikendalikan oleh Amerika dan Inggris. Sebaliknya dari sudut pandang ASEAN sendiri secara logika menganggap Tiongkok adalah ancaman selain karena negara berpaham komunis juga memiliki kedekatan dengan Uni Soviet.

Sehubungan dengan beberapa pernyataan di atas, penulis ingin menekankan jika yang menjadi penghambat dalam hubungan ASEAN dengan Tiongkok adalah masalah ideologi dan politik. Akan tetapi Dr Bambang Cipto (Cipto, 2006) memiliki pendapat lain yang bisa menjadi tambahan wawasan yakni ideologi dan agama, karena menurutnya mayoritas penduduk ASEAN beragama Kristen, Hindu, dan Islam sedangkan Tiongkok penganut komunis-atheis maka atas dasar itulah hubungan keduanya belum terjalin kira-kira pada dekade 1960-an akhir hingga 1970-an pertengahan.

Pandangan mengenai ini diperjelas lagi oleh Ratna Shofi Inayati melalui buku Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret Kerja Sama, yakni terdapat dua paradigma hubungan antara Tiongkok dengan ASEAN, yang pertama adalah sudut pandang negara tetangga Asia Tenggara terdapat beban historis yang perlu ditanggulangi bersama, lalu yang kedua adalah batas geografis Vietnam, Laos dan Myanmar di bagian barat daya dan selatan Tiongkok (Inayati, 2011). Contoh yang selaras dengan pandangan serta kedua paradigma di atas ialah, Myanmar, Kamboja dan Laos akan menjalin hubungan dengan Tiongkok seperti pada era prakolonial. Sementara Vietnam yang mempunyai sejarah dengan Tiongkok, berusaha menolak dominasi Tiongkok. Sedangkan Thailand

selalu menggunakan diplomasi klasik yakni menguntungkan negara dan tetap independensinya terjaga (Inayati, 2011).

Gerbang pencerahan hubungan ASEAN-Tiongkok terlihat pada masa kepemimpinan Den Xiao Ping yang mulai membuka jendela negara yang dirasa perlu mendapatkan angin segar dari luar. Buktinya adalah menerapkan reformasi politik ekonominya pada akhir dekade 1970 an (Cipto, 2006) yang dijuluki sebagai “liberalisme terbatas” dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara maju juga atau *open door policy* (Shambaugh, 2005), yang secara tidak langsung juga membuka hubungannya dengan negara-negara luar lebih intens lagi. Bukti dari pernyataan ini adalah pendekatan terhadap ASEAN pada akhir dekade 1970 an (Cipto, 2006), dengan menerapkan upaya-upaya penutupan Radio Rakyat Thailand di Propinsi Yunan tahun 1979, lalu pada tahun 1983 penutupan kembali dilakukan di Malaysia yakni Suara Demokrasi Malaya (radio komunis). Dengan adanya stimulus yang digencarkan oleh Tiongkok, mulai berakhirlah gerakan-gerakan komunis di kedua negara ASEAN tersebut.

Selanjutnya adalah kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li Peng ke Thailand tahun 1988, dijelaskan bahwa kunjungan Li Peng (Cipto, 2006) untuk memberi kabar terkait kebijakan dasar Tiongkok terhadap ASEAN berupa upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan hubungan ASEAN-Tiongkok. Menurut penulis ini merupakan sebuah langkah awal kemajuan perkembangan hubungan ASEAN-Tiongkok dan bukti ini dipertajam dengan adanya pembukaan hubungan diplomatik Indonesia kepada Tiongkok begitu sebaliknya pada tahun 1990 dan Singapura beberapa bulan setelahnya (Cipto, 2006) karena Singapura sangat menghormati Indonesia sehingga hanya bersedia membuka hubungan bila Indonesia telah mendahului.

Kemitraan ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok

Kunci pertama kemitraan ini terjadi pada Juli tahun 1991 yakni adanya Menteri Luar Negeri Tiongkok yakni Qian Qichen pada pembukaan ASEAN *Ministerial Meeting* ke 24 (Cipto, 2006). Ini menjadi kesempatan Tiongkok untuk menyatakan hubungan kerja sama antar kedua belah pihak dan ASEAN pun memberikan status positif dengan adanya Mitra Konsultasi Tiongkok (Cipto, 2006). Dalam kemitraan ini penulis akan membagi menjadi dua sub pembahasan yang pertama adalah sektor ekonomi-politik di mana Tiongkok adalah negara besar dengan perekonomian yang luar biasa kuatnya sedangkan ASEAN adalah wilayah strategis disertai pangsa pasar yang sangat menguntungkan. Dan yang kedua adalah terkait Politik dan Keamanan antara kedua belah pihak

yang sering menjadi ketakutan bagi ASEAN karena Tiongkok maju sebagai negara yang memiliki *power* kuat dalam militer.

Ekonomi-politik ASEAN-Tiongkok

Pada akhir dekade 1990-an lebih tepatnya pada saat dan paska krisis moneter, ASEAN mulai mengawatirkan mengenai dampak pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang bisa menjadi sebuah ancaman ekonomi bagi negara-negara di ASEAN. Inayati mengemukakan pendapat salah satu upaya ekonomi politik yang dilakukan oleh Tiongkok dalam mengatasi hal itu dengan adanya tawaran-tawaran kemitraan ekonomi yang lebih intens (Inayati, 2011). Tiongkok sendiri mengklaim dirinya pemimpin pada beberapa bidang seperti *digital media*, *voice-recognition* dan *voice-synthetic technology* (Pattiradjawane, 2005). Secara logika ASEAN dapat mengambil sebuah peluang yang menguntungkan dalam perkembangan ekonomi Tiongkok yang pesat, bagaimana tidak ASEAN bisa membuat Tiongkok menjadi pangsa pasar bahan-bahan baku dan energinya. Karena di tengah produksi yang tinggi pasti membutuhkan bahan-bahan baku dan energi untuk dasar pengelolannya.

Kemajuan dari pengambilan peluang tersebut dapat dilihat dari adanya ekspor tujuan Tiongkok oleh Thailand dan Malaysia dengan menggunakan fasilitas FTA ASEAN-Tiongkok adalah senilai 3,4 milyar dolar Amerika dan bila di persentasekan mencapai 10,8 persen (Inayati, 2011). Lalu porsi ASEAN dalam impor Tiongkok untuk pertanian dan perikanan meningkat menjadi 18,1 persen pada tahun 2007, ini meningkat dari tahun 2003 yang berada di kisaran 13,9 persen di mana pada waktu itu belum berlakunya FTA (Inayati, 2011). Sementara itu impor di antara kedua belah pihak juga meningkat seperti yang terjadi di Thailand dari Tiongkok menjadi 11,0 persen dari 7,8 persen, di samping itu peningkatan juga terjadi di Malaysia yang mencapai angka 19,5 persen dari 14,8 persen (Inayati, 2011). Indonesia sendiri masih belum terlalu stabil pada waktu itu, sumbangan besar terjadi pada ekspor, di tahun 2005 mencapai 16,6 persen, lalu meningkat secara lambat dengan 8 persen di tahun 2007 (Inayati 2011). Akan tetapi terjadi peningkatan yang cukup tajam pada periode Januari-Mei 2008 yang berada di 57,6 milyar atau bisa dikatakan meningkat sebesar 30 persen dibandingkan sebelumnya (Inayati, 2011).

Dengan adanya konsep *Free Trade Area* antara Tiongkok dengan ASEAN menjadi sebuah proyeksi perkembangan yang besar karena kedua wilayah tersebut mencakup populasi sebanyak 1,7 milyar jiwa dengan GDP gabungan sebesar 2 triliun dolar AS (Inayati, 2011). ASEAN-Tiongkok FTA ini diprioritaskan pada bidang-bidang yang meliputi pertanian, teknologi informasi, sumber daya

manusia, investasi dan sub-region sungai Mekong (Inayati, 2011). Hasil dari adanya pertemuan serta penandatanganan kesepakatan di Pnom Penh tahun 2002 adalah penurunan dan penghapusan tariff bea masuk yang dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu, pertama adalah, *Early Harvest Program (EHP)* yang telah dimulai 1 Januari 2004. Kedua ada *normal track* yang implementasi penurunan tarifnya pada 1 Juli 2005, dan yang ketiga adalah *Sensitive Track* tahun 2012 tarif maksimum sebesar 20 persen serta *Highly Sensitive Track* tahun 2015 tarif maksimum 50 persen (Inayati, 2011).

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok elah mendatangkan pertumbuhan yang sangat tajam dalam perdagangan bilateral Tiongkok-ASEAN, juga pasar yang akan berkembang mengikuti hal tersebut. Dalam tabel yang penulis kutip dari *International Monetary Fund* melalui Inayati menggambarkan total perdagangan ASEAN-Tiongkok mengalami kenaikan sebesar 400 persen pada tahun 1997 hingga 2004.

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Total perdagangan dalam \$US	25.1	23.6	27.2	39.4	41.8	54.8	78.2	105.9
(%)	(-5.9)	(15.3)	(44.9)	(6.1)	(31.1)	(42.7)	(35.4)	
Tiongkok total perdagangan kerja sama dengan ASEAN-10(%)	7.7	7.3	7.5	8.3	8.2	8.8	9.2	9.2

(Sumber: *International Monetary Fund, Direction of Trade Statistic Yearbook* dalam Inayati, 2011)

Keterangan dari tabel tersebut ialah adanya peningkatan perdagangan bilateral ASEAN-Tiongkok mencapai 20.8 persen per tahun 1990 hingga 2003. Pada tahun 2001 berada di angka 30 persen, sedangkan di tahun 2003 menduduki angka 78,3 miliar dolar AS, tembus ke dalam peningkatan

sebesar 42,9 persen. Meningkat lagi di tahun 2004 melebihi angka 109,9 miliar dolar AS dengan angka pertumbuhan sebesar hampir 40 persen. (Inayati, 2011). ASEAN sendiri menjadi mitra dagang nomor empat terbesar di Tiongkok, dan Tiongkok sendiri merupakan mitra dagang ASEAN nomor empat sesudah Uni Eropa (11,5 persen), Jepang (13,7 persen) dan Amerika Serikat (14 persen) (Cordenillo, 2005).

Keamanan-Politik ASEAN-Tiongkok

Tiongkok pada tahun 2002 mulai memperkuat anggaran belanjanya yang pada awalnya sekitar kisaran 6,06 milyar dolar AS pada tahun 1990 meningkat menjadi 14,6 milyar sedangkan tahun 2005 melonjak tajam di angka 80 milyar dolar, secara tidak langsung menstimulus Tiongkok duduk di peringkat 3 setelah Amerika Serikat dan Rusia (Inayati, 2011). ASEAN sempat cemas mengenai ancaman konflik terbuka di Laut Tiongkok Selatan yang pada akhirnya sedikit terminimalisir karena adanya *Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) di Pnom Penh tahun 2002 (Inayati, 2011). Perkembangan ini berlanjut pada tanggal 14 Maret 2005 yakni adanya kesepakatan guna melakukan survei bersama dalam mencari cadangan minyak yang kemungkinan terkandung di bawah Laut Tiongkok Selatan (Inayati, 2011).

Hal ini berlanjut kearah penandatanganan Tiongkok pada *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) yang dianggap sebagai pengakuan Tiongkok terhadap *code of conduct* (Inayati, 2011) setahun berikutnya setelah penandatanganan DOC yaitu pada pertemuan puncak ASEAN di Bali tahun 2003. Lalu, Tiongkok juga menandatangani *Memorandum on Understanding* (MoU) *on Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues* di tahun 2004 (Inayati, 2011). Kemitraan ini diperkuat lagi dengan mengadakan peringatan lima belas tahun ASEAN-Tiongkok pada KTT Nanning tahun 2006. KTT ini berisi pameran ASEAN-Tiongkok dan ASEAN-Tiongkok *Business Investment Summit* (Inayati, 2011).

ASEAN-Tiongkok Pada tahun 2016

Setelah santer kabar adanya ketegangan kembali antara ASEAN (beberapa negara klaim) dengan Tiongkok terkait konflik Laut Tiongkok Selatan, sekarang muncul kabar adanya peredaan eskalasi konflik setelah jalur damai antar negara di tempuh. Tiongkok mengambil langkah maju untuk melanjutkan kerja sama yang lebih intens dengan ASEAN. Begitupula dengan negara-negara ASEAN juga semakin mempererat hubungan kerja sama dengan Tiongkok.

Di lansir melalui Berita Satu, Asia Tenggara mulai mendekati Tiongkok dibanding Amerika Serikat, negara-negara di Asia Tenggara kini lebih memilih untuk melakukan kerja sama dengan perekonomian terbesar di dunia, Tiongkok, daripada dengan Amerika Serikat di mana kepemimpinan Presiden Terpilih Donald Trump lebih mengutamakan kebijakan proteksionisme (Berita Satu, 2016). Mengutip pernyataan dari Santitarn Sathirathai seorang ekonomi *Credit Suisse* Singapura melalui Berita Satu, Tiongkok memiliki arah yang jelas, mengetahui apa yang di inginkan dari kerja sama yang saling menguntungkan ini. Bukan hanya kerja sama antara pemerintah (*government to government*), tetapi pelaku usaha juga mulai mengambil inisiatif (Sathirathai dalam Berita Satu, 2016).

Bila dari Tiongkok inisiatif ini terlihat dari Forum Kerja Sama kapasitas Produksi Internasional Tiongkok-ASEAN yang baru saja dibuka. Forum Kerja Sama ini dibuka di Tuole, Kabupaten Panxian, Guizhou, Tiongkok. Seperti yang di kutip dari China Radio Internasional. Forum Kerja Sama ini adalah yang pertama kali di adakan antara kedua belah pihak dan menurut Ketua Komite Tetap KRN Propinsi Guizhou, sekarang adalah saat perubahan karena Tiongkok sedang mengadakan pemilihan wakil basis. Sedangkan AS baru memilih Presiden baru, Panxian juga mengalami perubahan, bertolak dari usaha listrik dengan tenaga batu bara, mengembangkan usaha dengan teknologi baru dan usaha wisata (China Radio Internasional, 2016).

Hubungan kerja sama ini diperkuat oleh kehadiran Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang di KTT ASEAN+3, di sela-sela pertemuan itu Li Keqiang mengajukan enam poin usul tentang peningkatan kerja sama 10+3, pertama adalah meningkatkan kerja sama di bidang keamanan moneter, kedua meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi, ketiga ialah mengintensifkan kerja sama di bidang pertanian dan pengentasan kemiskinan, lalu yang keempat adalah mendorong upaya konektivitas. Kelima yakni memperbarui pola kerja sama dalam bidang kapasitas produksi, dan yang keenam atau terakhir mengutamakan komunikasi di bidang hubungan antar masyarakat (China Radio Internasional, 2016)

Kesimpulan

Dari perkembangan regionalisme di Asia Tenggara dapat ditelaah bahwa pada dasarnya ingin mengintegrasikan diri karena pembendungan keamanan dan politik ideologi bukan melalui ekonomi. Ini yang patut menjadi pembeda antara ASEAN dengan Uni Eropa yang awalnya adalah bentuk integrasi kerja sama ekonomi khususnya perdagangan dan penstabilan ekonomi paska Perang Dunia II. Penulis optimis dengan adanya ASEAN ini hingga kedepannya, karena dalam penerapan

pandangan-pandangan regionalisme seperti neo-fungsionalisme, neo-liberalisme hingga konstruktivisme sendiri ASEAN sudah mewakili karakteristik pandangan tersebut seperti loyalitas negara-negara anggota terhadap institusi dengan menekan egoism kepentingan nasionalnya, lalu mengutamakan hubungan perdamaian dengan negara-negara anggota sekaligus meluaskan pasar hingga ke negara yang sempat dianggap ancaman bersama, dan konstruktivisme pun memandang adanya kesadaran kawasan dan terlihat di awal negara ASEAN hanya lima dan berkembang menjadi sepuluh akibat kesadaran itu.

Hubungan ekonomi dengan Tiongkok bisa dipandang hubungan ekonomi liberalisme, karena memandang maksimalisasi kesejahteraan global, harmoni dan saling menguntungkan. Sama-sama mau melakukan kerja sama walaupun di tengah ancaman yang sewaktu-waktu datang. Selain itu pasar yang berkembang menjadi perdagangan bebas (penurunan tarif dan hambatan) merupakan bukti kuat bila terjadi hubungan liberalisme di antara keduanya. Mungkin saja Tiongkok bersikap sedikit lebih lunak terkait masalah Laut Tiongkok Selatan ini karena memandang ASEAN sebagai mitra bisnis yang menguntungkan. Dan juga melihat adanya potensi timbal balik besar dari ASEAN karena Amerika Serikat sebagai mitra dagang terbesarnya mulai ditinggalkan akibat konstelasi politik internalnya yang bisa saja merugikan ASEAN sendiri.

Referensi:

1. Cipto, Bambang. 2006. Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
2. Cordenillo, L Raul. 2005. *The Economic Benefits to ASEAN of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*. Nn:Nn
3. Inayati, S.Ratna. 2011. Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret Kerja Sama. Jakarta: P2P-LIPI
4. Ladiqi, Suyatno. 2016. Regionalisme. Disajikan dalam Mata Kuliah Pengantar Regionalisme, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ladiqi, Suyatno. 2016. Uni Eropa. Disajikan dalam Mata Kuliah Pengantar Regionalise, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Pattiradjawane, L Rene. 2005. Menjadi RRC yang Berkualitas. Indonesia: Kompas
7. Shambaugh, David. 2005. *Power Shift: The Rise of China and Asia's New Dynamics*. California: University of California Press
8. S Nuraeni, Silvy Deasy & Sudirman Arfin. 2010. Regionalisme: Dalam Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Online

9. Berita Satu. 2016. Lupakan AS, Asia Tenggara Kini Lebih Pilih Mendekat ke Tiongkok. <http://www.beritasatu.com/dunia/404140-lupakan-as-asia-tenggara-kini-lebih-pilih-mendekat-ke-tiongkok.html> (online). *Diakses pada 14 Desember 2016*
10. China Radio Internasional. 2016. Perdana Menteri Tiongkok Hadiri KTT ASEAN + 3. <http://indonesian.cri.cn/201/2016/09/08/1s162477.htm> (online). *Diakses pada 14 Desember 2016*
11. China Radio Internasional. 2016. Forum Kerja Sama Kapasitas Produksi Internasional Tiongkok-ASEAN Dibuka. <http://indonesian.cri.cn/201/2016/11/17/1s163352.htm> (online). *Diakses pada 14 Desember 2016*